

KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN MENGURANGI PENGANGGURAN

Irsyad Maulana Priyanto¹, Lulu Firdausi², Naila Ayuningtyas³, Sarpini⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Email : irsyadmaulanapriyanto31@gmail.com¹, lulufirda078@gmail.com²,
nailaningtyas16@gmail.com³, sarpini@uinsaizu.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kebijakan fiskal dan moneter dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran, khususnya dalam konteks globalisasi. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan fiskal, yang melibatkan pengelolaan belanja pemerintah dan perpajakan, serta kebijakan moneter, yang fokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kedua kebijakan ini sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter serta dampak gabungannya terhadap perekonomian, terutama dalam mengatasi masalah seperti pengangguran dan inflasi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan ini dalam berbagai kondisi ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik dapat saling melengkapi, membantu menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan. Namun, konflik antara keduanya dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang melemahkan efektivitasnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi kebijakan yang sukses, bersama dengan respons yang fleksibel terhadap tantangan ekonomi global, sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang dan mengurangi pengangguran.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Moneter, Model Analisis, Kurva, Hubungan Fiskal, Moneter dan Pengangguran

ABSTRACT

This study examines the role of fiscal and monetary policies in influencing economic growth, inflation, and unemployment, particularly in the context of globalization. The background of the research highlights the critical importance of fiscal policy, which involves the management of government spending and taxation, and monetary policy, which focuses

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

on regulating money supply and interest rates. Both policies are central to achieving economic stability and sustainable growth. The objective of the study is to analyze the interaction between fiscal and monetary policies and their combined impact on the economy, especially in addressing issues such as unemployment and inflation. A qualitative approach is employed, using descriptive analysis to evaluate the effectiveness of these policies in various economic conditions. The findings suggest that well-coordinated fiscal and monetary policies can complement each other, helping to stabilize the economy and promote growth. However, conflicts between the two can result in imbalances, undermining their effectiveness. The study concludes that successful policy coordination, along with a flexible response to global economic challenges, is essential for achieving long-term economic stability and reducing unemployment.

Keywords: *Fiscal and Monetary Policy, Analytical Models, Curves, Relationship Between Fiscal Policy, Monetary Policy and Unemployment*

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terhubung dan mengalami globalisasi, hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi faktor penting dalam menentukan arah perekonomian suatu negara, karena kedua kebijakan ini berinteraksi dan memiliki dampak yang saling memperkuat atau bahkan saling bertentangan dalam mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal, yang melibatkan pengelolaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan, berfungsi untuk mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian melalui perubahan dalam belanja pemerintah dan struktur pajak. Sementara itu, kebijakan moneter, yang berfokus pada pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga, bertujuan untuk mempengaruhi stabilitas harga, likuiditas, serta investasi dan konsumsi dalam perekonomian.

Kedua kebijakan ini berperan besar dalam mempengaruhi berbagai indikator ekonomi penting seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi. Kedua kebijakan ini memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi, baik dalam kondisi perekonomian yang berkembang pesat maupun dalam masa krisis ekonomi. Misalnya, dalam situasi resesi atau perlambatan ekonomi, kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah atau pemotongan pajak, dapat digunakan untuk merangsang permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter yang lebih longgar, seperti penurunan suku bunga, dapat meningkatkan investasi dan konsumsi dengan mempermudah akses kredit, serta mendorong perekonomian untuk pulih dari keterpurukan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menciptakan dampak yang lebih besar dan lebih efektif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran (Ramesh Chandra Das, 2024).

Untuk memahami lebih dalam bagaimana kedua kebijakan ini bekerja, jurnal ini mengkaji beberapa model analisis yang umum digunakan dalam ekonomi makro, seperti model IS-LM (Investment Saving - Liquidity Money), yang mengidentifikasi hubungan antara pasar barang dan pasar uang, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat memengaruhi keduanya. Analisis ini juga mengulas kurva permintaan uang, yang menghubungkan tingkat suku bunga dengan keinginan masyarakat untuk menyimpan uang, dan bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter dapat mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Selanjutnya, penelitian ini membahas hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pengangguran, yang sering kali menjadi perhatian utama pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Salah satu alat yang digunakan untuk memahami hubungan ini adalah kurva Phillips, yang menggambarkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Di satu sisi, kebijakan yang bertujuan mengurangi pengangguran dapat meningkatkan inflasi, sementara kebijakan untuk menurunkan inflasi dapat meningkatkan pengangguran.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat berinteraksi secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi pengangguran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, jurnal ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana kedua kebijakan tersebut dapat saling melengkapi atau menimbulkan ketidakseimbangan jika tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman mendalam tentang interaksi ini sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

LANDASAN TEORI

Menurut Nopirin (1987: 51) Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi namun faktor-faktor ini di luar kontrol pemerintah. Kebijakan moneter merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan fiskal menjelaskan bentuk pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan oleh pemerintah di akumulasikan sebagai pendapatan lalu yang digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program agar menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan untuk keseimbangan perekonomian. Kebijakan fiskal sendiri merupakan salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep teori ekonomi, serta untuk menganalisis interaksi

antara kebijakan fiskal dan moneter, serta dampaknya terhadap perekonomian, termasuk pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali hubungan yang kompleks antara teori dan praktik dalam ranah kebijakan ekonomi, terutama dalam konteks ekonomi yang sedang berkembang atau berfluktuasi. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data melalui literatur yang sudah ada, tetapi juga berusaha menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana teori-teori ekonomi tersebut diterapkan dalam dunia nyata, serta untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap kebijakan ekonomi yang diambil.

Pendekatan deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter secara lebih terperinci dan mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai mekanisme yang mendasari kebijakan-kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi. Salah satu fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi perekonomian, terutama dalam hal pengangguran, inflasi, dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Peneliti akan menggali model-model ekonomi yang sering digunakan dalam teori ekonomi, seperti model IS-LM (Investment Saving – Liquidity Money) dan kurva Phillips, untuk menjelaskan fenomena-fenomena tersebut, serta bagaimana kedua kebijakan tersebut saling berinteraksi dalam konteks perekonomian yang dinamis.

Dalam analisis ini, peneliti berfokus pada bagaimana kebijakan fiskal, yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak, dapat mempengaruhi permintaan agregat dan output ekonomi. Sementara itu, kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, akan dianalisis dari perspektif pengaruhnya terhadap suku bunga dan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Peneliti juga akan membahas bagaimana ketidakseimbangan atau ketidakselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, seperti inflasi yang tinggi atau pengangguran yang meningkat, dan bagaimana hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengandalkan studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku teks, artikel jurnal, laporan kebijakan, serta sumber-sumber lainnya, akan dijadikan referensi untuk memahami teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Peneliti akan melakukan penelusuran mendalam terhadap teori-teori ini, serta menelaah bagaimana penerapannya di negara-negara dengan kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan cara ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi antara kebijakan fiskal, moneter, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti pengangguran, inflasi, serta ketimpangan ekonomi.

Secara keseluruhan, metode kualitatif ini memberikan kesempatan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan sistematis mengenai topik yang kompleks ini, serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat saling mempengaruhi dan berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan ekonom dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi dan praktik kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan fiskal merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mempengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan ini melibatkan penggunaan instrumen-instrumen seperti pajak, pengeluaran publik, dan transfer sosial untuk mengatur permintaan agregat dalam perekonomian. Permintaan agregat sendiri adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Salah satu peran utama kebijakan fiskal adalah untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi ketimpangan yang bisa terjadi akibat fluktuasi ekonomi yang ekstrem, seperti resesi atau inflasi yang tinggi.

Dalam situasi resesi, yaitu ketika perekonomian mengalami kontraksi yang signifikan dan tingkat pengangguran meningkat, pemerintah cenderung mengadopsi kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak. Peningkatan pengeluaran publik bisa berupa investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, peningkatan bantuan sosial, atau pembiayaan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, pengurangan pajak, baik pajak penghasilan individu maupun pajak perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga dan meningkatkan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dan memperluas produksi. Semua tindakan ini dirancang untuk merangsang konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga membantu keluar dari situasi resesi.

Sebaliknya, ketika perekonomian mulai mengalami overheating atau inflasi yang tinggi akibat permintaan yang melebihi kapasitas produksi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif berfungsi untuk mendinginkan perekonomian dan mengurangi tekanan inflasi. Ini dapat dilakukan melalui pengurangan belanja publik, yang berarti pengurangan alokasi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan atau pengurangan dana untuk program sosial. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mengurangi daya beli konsumen. Kenaikan pajak ini dapat mengurangi konsumsi rumah tangga dan meredakan tekanan terhadap harga barang dan jasa. Dengan menerapkan kebijakan fiskal kontraktif, pemerintah berupaya menstabilkan perekonomian, menghindari pembengkakan inflasi, serta menjaga daya saing dan kestabilan nilai mata uang.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal adalah alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk memengaruhi siklus ekonomi dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan pengangguran, dan pengendalian inflasi. Dalam prakteknya, kebijakan fiskal harus dikelola dengan hati-hati, karena keputusan yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, seperti defisit anggaran yang besar atau penurunan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal sering kali

dipadukan dengan kebijakan moneter untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam perekonomian.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga demi mencapai kestabilan ekonomi, khususnya mengontrol inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Bank sentral memiliki instrumen utama seperti operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga, dan cadangan wajib minimum untuk mempengaruhi likuiditas dan kredit dalam ekonomi. Kebijakan moneter ekspansif diterapkan ketika suku bunga diturunkan dan jumlah uang beredar ditingkatkan, sementara kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan menaikkan suku bunga dan mengurangi uang beredar.

Kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam mengendalikan perekonomian. Kebijakan fiskal mempengaruhi perekonomian melalui pengeluaran pemerintah dan perpajakan, sedangkan kebijakan moneter bekerja melalui kontrol terhadap suku bunga dan kredit. Dalam praktiknya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting untuk menghindari konflik yang dapat melemahkan efektivitas masing-masing kebijakan.

2. Model Analisis IS-LM dalam Kebijakan Ekspansi dan Kontraksi

Model IS-LM adalah alat analisis yang sangat penting dalam ekonomi makro untuk menggambarkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, dua komponen kunci dalam perekonomian yang saling berinteraksi. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh John Hicks pada tahun 1937 dan sejak itu menjadi salah satu dasar penting dalam analisis kebijakan ekonomi. Dalam model ini, terdapat dua kurva utama yang menggambarkan keseimbangan masing-masing pasar, yaitu kurva IS dan kurva LM. Kedua kurva ini saling berinteraksi untuk menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun moneter, dapat mempengaruhi variabel-variabel utama seperti tingkat suku bunga, pendapatan nasional, dan output ekonomi.

Kurva IS (Investment-Savings) menggambarkan keseimbangan di pasar barang, yaitu pasar yang mencakup permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva IS menunjukkan kombinasi antara tingkat suku bunga (interest rate) dan tingkat pendapatan (output) di mana total pengeluaran dalam perekonomian, yang terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah, sama dengan total output yang diproduksi. Dalam konteks ini, tingkat suku bunga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat investasi. Semakin rendah suku bunga, semakin tinggi kecenderungan untuk berinvestasi karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Dengan demikian, kurva IS mencerminkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan, yang berarti bahwa ketika suku bunga naik, pendapatan yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan pasar barang akan turun.

Sementara itu, kurva LM (Liquidity Preference-Money Supply) menggambarkan keseimbangan di pasar uang, yang mencakup hubungan antara permintaan dan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan di mana permintaan uang untuk transaksi dan untuk tujuan spekulatif seimbang dengan penawaran uang yang tersedia dalam perekonomian. Di pasar uang, permintaan uang

dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, pendapatan nasional, yang mencerminkan seberapa banyak uang yang diperlukan untuk melakukan transaksi seiring dengan peningkatan output ekonomi; dan kedua, tingkat suku bunga, yang mempengaruhi keinginan individu untuk memegang uang dalam bentuk likuid dibandingkan dengan aset lainnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi pula permintaan uang, karena individu dan perusahaan memerlukan uang lebih banyak untuk melakukan transaksi. Di sisi lain, tingkat suku bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan akan uang tunai, karena orang lebih memilih untuk menyimpan uang dalam bentuk aset yang lebih menguntungkan, seperti obligasi atau saham. Kurva LM menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga, yang berarti bahwa untuk mencapai keseimbangan pasar uang pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, tingkat suku bunga juga harus lebih tinggi.

Model IS-LM sangat berguna dalam analisis kebijakan ekonomi, terutama untuk memahami dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan fiskal, yang mencakup perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau perpajakan, mempengaruhi kurva IS. Misalnya, peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat, yang akan menggeser kurva IS ke kanan dan mendorong peningkatan output dan pendapatan. Sebaliknya, kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral dan mencakup perubahan dalam suku bunga atau jumlah uang yang beredar, mempengaruhi kurva LM. Peningkatan jumlah uang yang beredar atau penurunan suku bunga dapat menggeser kurva LM ke kanan, yang pada gilirannya menurunkan suku bunga dan meningkatkan pendapatan. Dengan memadukan kedua kurva ini, model IS-LM memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi keseimbangan pasar barang dan pasar uang, serta bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, pengangguran, dan inflasi dalam perekonomian.

Secara keseluruhan, model IS-LM adalah alat yang sangat berguna dalam ekonomi makro karena menyediakan cara yang terstruktur untuk memahami dan menganalisis bagaimana berbagai kebijakan ekonomi dapat berinteraksi dan mempengaruhi perekonomian. Model ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana perubahan dalam kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi, mengelola inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam kebijakan ekspansi fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah, kurva IS bergeser ke kanan karena kenaikan permintaan agregat, yang mendorong pendapatan nasional naik. Namun, jika tidak ada respons dari kebijakan moneter, kenaikan suku bunga akibat peningkatan permintaan uang bisa menurunkan investasi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai crowding out. Untuk mencegah hal ini, bank sentral dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga dan memperluas penawaran uang, yang akan menggeser kurva LM ke kanan, sehingga mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa kenaikan suku bunga yang signifikan (Syamsuri, 2020).

Sebaliknya, kebijakan kontraktif baik dalam fiskal maupun moneter bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat. Dalam kebijakan fiskal kontraktif, seperti pemotongan belanja pemerintah, kurva IS bergeser ke kiri, yang mengurangi output dan menurunkan

suku bunga. Kebijakan moneter kontraktif juga menggeser kurva LM ke kiri dengan menaikkan suku bunga, yang menekan investasi dan konsumsi. Kombinasi kedua kebijakan ini efektif untuk menekan inflasi, namun dapat menimbulkan risiko resesi jika diterapkan secara berlebihan.

3. Kurva Permintaan Uang untuk Spekulasi dan Efektivitas Kebijakan

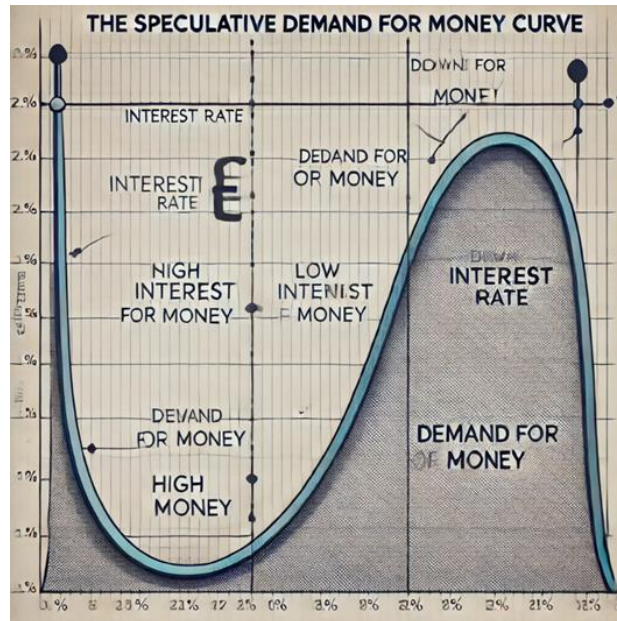
Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Pada suku bunga yang tinggi, orang lebih cenderung memegang obligasi karena memberikan pengembalian yang lebih tinggi, sehingga permintaan uang tunai rendah. Sebaliknya, ketika suku bunga rendah, orang lebih memilih menyimpan uang tunai daripada obligasi karena pengembalian obligasi rendah. Oleh karena itu, kurva permintaan uang untuk spekulasi memiliki kemiringan negatif: semakin rendah suku bunga, semakin tinggi permintaan uang tunai untuk spekulasi.

Dalam konteks kebijakan moneter, permintaan uang untuk spekulasi mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut. Jika bank sentral menurunkan suku bunga, namun pelaku ekonomi memutuskan untuk menyimpan uang tunai daripada berinvestasi di obligasi atau aset lain, kebijakan moneter menjadi kurang efektif karena jumlah uang yang beredar tidak menstimulasi perekonomian secara signifikan. Fenomena ini disebut sebagai *liquidity trap*, di mana meskipun suku bunga rendah, permintaan agregat tetap tidak naik (Raja Masbar, 2014).

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam menanggapi perubahan suku bunga. Ketika pemerintah meningkatkan belanja publik sebagai bagian dari kebijakan fiskal ekspansif, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika suku bunga berada pada tingkat yang sangat rendah, masyarakat cenderung lebih memilih untuk menyimpan uang tunai daripada menginvestasikannya dalam proyek-proyek produktif atau mengonsumsinya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya fenomena yang dikenal sebagai "*liquidity trap*," di mana meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengeluaran, dampak positif yang diharapkan tidak tercapai karena masyarakat lebih memilih untuk menahan likuiditas mereka. Akibatnya, peningkatan belanja publik yang seharusnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi justru menjadi kurang efektif.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi dalam merumuskan kebijakan. Kombinasi yang bijak antara kebijakan fiskal dan moneter dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan belanja publik, bank sentral dapat mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut atau memperluas penawaran uang untuk mendorong masyarakat agar lebih berani berinvestasi dan mengonsumsi. Dengan cara ini, kebijakan fiskal dan moneter tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga dapat memperkuat dampak satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan pengurangan pengangguran. Pendekatan yang terkoordinasi ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Gambar 1 Kurva Permintaan



Gambar di atas menunjukkan kurva permintaan uang untuk spekulasi dengan kemiringan negatif. Kurva ini menggambarkan bahwa saat suku bunga menurun, permintaan uang untuk spekulasi meningkat, karena orang lebih memilih menyimpan uang tunai daripada berinvestasi di aset berbunga rendah. Sebaliknya, pada suku bunga tinggi, permintaan uang menurun karena orang lebih suka menyimpan uang dalam bentuk obligasi atau aset lainnya.

4. Hubungan Antara Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Pengangguran

Selain pengaruhnya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter juga berperan penting dalam mengendalikan tingkat pengangguran, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam perekonomian, terutama saat terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Dalam kondisi resesi, ketika permintaan agregat menurun akibat penurunan konsumsi dan investasi, pengangguran cenderung meningkat karena perusahaan menghadapi penurunan produksi dan pendapatan, sehingga mereka mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Dalam situasi ini, pengangguran tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga menghambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekspansif, seperti peningkatan belanja pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur atau pemotongan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga lebih banyak barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat dan lebih banyak investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, perusahaan dapat meningkatkan produksinya, yang pada gilirannya membuka peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan ini berfungsi untuk menciptakan dorongan yang diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menstabilkan pasar tenaga kerja yang terdampak oleh resesi (Hery Haryanto, 2022).

Sementara itu, kebijakan moneter ekspansif, seperti penurunan suku bunga dan peningkatan jumlah uang beredar, dapat mendorong investasi dan konsumsi dalam

perekonomian. Ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih rendah, yang berarti perusahaan dan individu dapat memperoleh akses ke kredit dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Hal ini mendorong perusahaan untuk meminjam uang guna melakukan investasi baru, seperti memperluas kapasitas produksi, memperbarui peralatan, atau meluncurkan produk baru, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah juga dapat mendorong konsumen untuk meningkatkan pengeluaran mereka, karena biaya pembiayaan, seperti cicilan kredit atau hipotek, menjadi lebih murah, yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Namun, kebijakan moneter juga harus diatur dengan hati-hati, karena jika penurunan suku bunga dilakukan secara berlebihan atau terlalu cepat, hal ini bisa memicu inflasi yang tidak terkendali. Inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakstabilan harga, yang pada gilirannya bisa mengurangi manfaat jangka panjang dari kebijakan ekspansif tersebut. Selain itu, meskipun suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan dalam jangka pendek, efeknya terhadap penciptaan lapangan kerja mungkin terbatas jika perusahaan atau konsumen tidak cukup yakin untuk melakukan investasi atau konsumsi lebih lanjut dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan moneter ekspansif harus diterapkan dengan pertimbangan yang matang agar dapat mencapai tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja, tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, seperti inflasi yang tidak terkendali.

Di sisi lain, kebijakan kontraktif, baik yang bersifat fiskal maupun moneter, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran jika diterapkan terlalu ketat atau dalam periode waktu yang tidak tepat. Kebijakan kontraktif ini biasanya diambil dengan tujuan untuk mengendalikan inflasi, menurunkan defisit anggaran, atau mendinginkan perekonomian yang terlalu panas, namun jika tidak diatur dengan hati-hati, dampaknya terhadap pasar tenaga kerja bisa sangat merugikan. Salah satu bentuk kebijakan fiskal kontraktif adalah pengurangan belanja pemerintah, yang berarti bahwa pemerintah mengurangi pengeluaran untuk berbagai proyek pembangunan, infrastruktur, atau program sosial. Selain itu, kebijakan fiskal kontraktif juga dapat mencakup peningkatan pajak, yang akan mengurangi pendapatan disposable rumah tangga dan mengurangi daya beli konsumen. Dalam hal ini, pengurangan pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak dapat menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian, yang berisiko mengurangi produksi barang dan jasa. Ketika permintaan agregat menurun, perusahaan-perusahaan akan menghadapi penurunan pendapatan dan keuntungan, yang sering kali mendorong mereka untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, tingkat pengangguran bisa meningkat, dan kondisi ekonomi bisa semakin memburuk.

Selain itu, kebijakan moneter kontraktif, yang biasanya melibatkan kenaikan suku bunga dan pembatasan jumlah uang yang beredar, juga dapat memperburuk kondisi pasar tenaga kerja. Ketika bank sentral menaikkan suku bunga, biaya pinjaman bagi perusahaan dan konsumen meningkat, yang dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi atau mengkonsumsi barang dan jasa. Bagi perusahaan, kenaikan suku bunga berarti biaya modal yang lebih tinggi untuk pembiayaan investasi, yang dapat menurunkan tingkat investasi

dalam ekspansi produksi atau penciptaan lapangan kerja baru. Bagi konsumen, kenaikan suku bunga dapat mengurangi daya beli, karena cicilan utang menjadi lebih mahal dan kredit konsumsi seperti kartu kredit atau pinjaman rumah menjadi lebih mahal. Dalam situasi seperti ini, konsumsi rumah tangga yang berkurang akan menyebabkan penurunan dalam permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya bisa menurunkan tingkat produksi dan menyebabkan perusahaan untuk mengurangi tenaga kerja. Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran, terutama dalam sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, seperti ritel, otomotif, dan konstruksi.

Kebijakan moneter kontraktif juga dapat menyebabkan penguatan mata uang domestik karena tingginya suku bunga menarik aliran modal asing ke dalam perekonomian, yang pada gilirannya dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif di pasar internasional. Dengan berkurangnya daya saing ekspor, permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi dalam negeri bisa turun, yang bisa mempengaruhi industri-industri tertentu, seperti manufaktur, yang sering kali bergantung pada permintaan ekspor. Penurunan permintaan untuk barang-barang ekspor juga dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan dalam sektor-sektor tersebut, sehingga menambah angka pengangguran.

Dengan demikian, meskipun kebijakan kontraktif, baik fiskal maupun moneter, dapat efektif dalam mengendalikan inflasi dan mengurangi ketidakseimbangan ekonomi, penerapannya yang terlalu ketat atau tidak tepat waktu dapat menyebabkan dampak yang merugikan terhadap pasar tenaga kerja. Kenaikan pengangguran akibat kebijakan tersebut dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lapangan pekerjaan dan ekonomi secara keseluruhan sebelum mengambil langkah-langkah kontraktif yang drastis. Kebijakan kontraktif harus dilaksanakan dengan hati-hati dan, jika memungkinkan, dipadukan dengan langkah-langkah yang dapat membantu mendukung pekerja yang terdampak, seperti program pelatihan ulang atau bantuan sosial, untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Kurva Philips dan Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Kurva Phillips menggambarkan hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka pendek, yang mencerminkan adanya trade-off yang terjadi antara kedua variabel tersebut dalam perekonomian. Menurut teori ini, ketika tingkat pengangguran berada pada level yang rendah, inflasi cenderung meningkat, dan sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, inflasi biasanya cenderung menurun. Fenomena ini terjadi karena interaksi antara permintaan tenaga kerja, upah pekerja, biaya produksi, dan tekanan harga dalam perekonomian. Ketika pengangguran rendah, pasar tenaga kerja menjadi lebih ketat, yang berarti bahwa perusahaan-perusahaan harus menawarkan upah yang lebih tinggi untuk menarik dan mempertahankan pekerja. Kenaikan upah ini, meskipun menguntungkan bagi pekerja, juga akan menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi perusahaan. Untuk mempertahankan margin keuntungan mereka, perusahaan kemudian cenderung menaikkan harga barang dan jasa yang mereka produksi, yang pada gilirannya mendorong terjadinya inflasi. Fenomena ini dikenal sebagai “cost-push inflation” atau inflasi

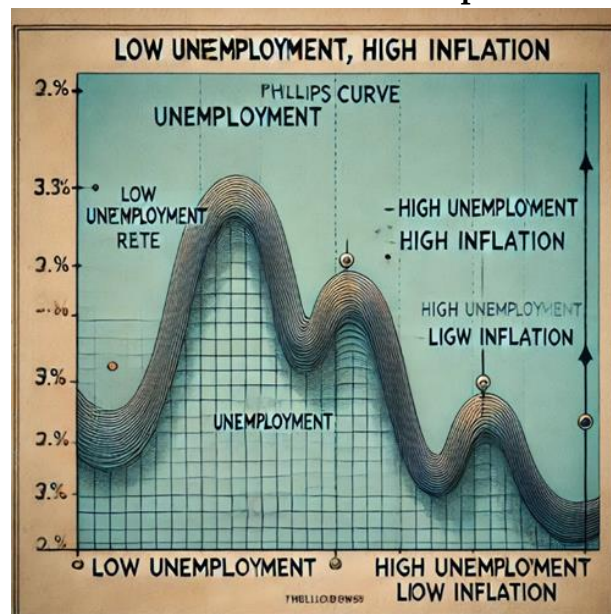
yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi, yang terjadi ketika biaya tenaga kerja, bahan baku, atau komponen lainnya meningkat.

Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, inflasi biasanya cenderung rendah atau bahkan menurun. Hal ini terjadi karena ketika lebih banyak orang menganggur, daya beli masyarakat berkurang, dan permintaan terhadap barang dan jasa pun menurun. Dengan rendahnya permintaan, perusahaan-perusahaan akan merasa kurang terdorong untuk menaikkan harga barang dan jasa mereka, bahkan mereka mungkin akan menurunkan harga agar tetap menarik minat konsumen dan tetap kompetitif di pasar. Dalam situasi seperti ini, tekanan harga cenderung menurun, yang berkontribusi pada turunnya tingkat inflasi. Fenomena ini menggambarkan bagaimana permintaan agregat yang rendah dapat menurunkan tekanan harga dan mengurangi inflasi dalam perekonomian.

Pemahaman tentang kurva Phillips sangat penting dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter. Kedua kebijakan ini seringkali dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran, di satu sisi, dan mengendalikan inflasi, di sisi lain. Jika pemerintah atau bank sentral ingin mengurangi pengangguran, kebijakan ekspansif seringkali diterapkan, baik melalui peningkatan belanja pemerintah, pemotongan pajak, atau pelonggaran kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya dapat merangsang investasi, konsumsi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Namun, kebijakan ekspansif juga berisiko meningkatkan inflasi karena mendorong kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa di tengah kapasitas produksi yang terbatas, yang dapat menyebabkan harga-harga meningkat.

Di sisi lain, kebijakan kontraktif, yang biasanya diterapkan untuk mengendalikan inflasi, bekerja dengan cara yang berbeda. Kebijakan fiskal kontraktif melibatkan pengurangan belanja pemerintah atau peningkatan pajak, sementara kebijakan moneter kontraktif melibatkan peningkatan suku bunga atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi permintaan agregat dan mendinginkan perekonomian, sehingga dapat menekan inflasi. Namun, kebijakan kontraktif berisiko menambah tingkat pengangguran, karena penurunan permintaan agregat dapat menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam jangka pendek, ini bisa memperburuk masalah pengangguran.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang berhubungan dengan inflasi dan pengangguran harus sangat hati-hati dan terukur. Pembuat kebijakan perlu memahami dinamika ini dengan baik untuk merancang kebijakan yang tepat dan mengelola trade-off antara inflasi dan pengangguran. Dalam situasi tertentu, seperti pada saat terjadinya resesi, kebijakan ekspansif bisa lebih dibutuhkan meskipun berisiko meningkatkan inflasi. Sebaliknya, dalam periode ekonomi yang sedang tumbuh dengan inflasi yang tinggi, kebijakan kontraktif mungkin diperlukan meskipun berisiko menyebabkan peningkatan pengangguran. Idealnya, kebijakan yang diterapkan haruslah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berubah-ubah, serta mempertimbangkan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas harga dalam perekonomian.

Gambar 2 Kurva Philips

Gambar di atas menunjukkan kurva Phillips yang memperlihatkan hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran, yang menggambarkan bagaimana kedua variabel ini saling berinteraksi dalam perekonomian. Ketika tingkat pengangguran rendah, inflasi cenderung tinggi, karena dengan semakin banyaknya orang yang bekerja, permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, yang mendorong harga-harga naik. Selain itu, ketika pasar tenaga kerja ketat, perusahaan mungkin harus menaikkan upah untuk menarik pekerja, dan biaya upah yang lebih tinggi ini akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi, yang mengarah pada inflasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, inflasi cenderung rendah atau bahkan menurun, karena rendahnya permintaan terhadap barang dan jasa akibat lebih banyaknya orang yang menganggur, menyebabkan tekanan harga berkurang.

Dalam kondisi ini, perusahaan tidak merasa terdorong untuk menaikkan harga, bahkan mungkin menurunkannya untuk tetap menarik konsumen yang memiliki daya beli lebih rendah. Kurva Phillips ini sangat penting dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi, terutama kebijakan fiskal dan moneter, dapat mempengaruhi keseimbangan antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan ekspansif yang bertujuan mengurangi pengangguran dengan meningkatkan belanja pemerintah atau menurunkan suku bunga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun berisiko meningkatkan inflasi. Di sisi lain, kebijakan kontraktif yang bertujuan mengendalikan inflasi dengan meningkatkan pajak atau menaikkan suku bunga dapat menurunkan inflasi, tetapi berpotensi meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, kurva Phillips memberikan gambaran yang sangat berguna bagi pembuat kebijakan untuk menilai trade-off antara menjaga inflasi tetap terkendali dan menciptakan lapangan kerja, yang merupakan tantangan utama dalam pengelolaan perekonomian.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah ditemukan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kedua kebijakan ini, apabila diterapkan secara bersamaan dan terkoordinasi, dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan dengan penerapan kebijakan tersebut secara terpisah. Sebagai contoh, kebijakan fiskal yang melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak dapat merangsang permintaan agregat, sementara kebijakan moneter yang melibatkan penurunan suku bunga atau peningkatan jumlah uang yang beredar dapat memperbaiki likuiditas dalam perekonomian, mendorong investasi, serta mempermudah akses kredit bagi konsumen dan perusahaan. Kombinasi dari kedua kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga dan permintaan domestik.

Namun, meskipun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat berpotensi untuk memperbaiki perekonomian, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau di tengah krisis ekonomi. Salah satu fenomena yang sering menjadi penghalang adalah liquidity trap atau perangkap likuiditas, yang terjadi ketika suku bunga telah sangat rendah dan kebijakan moneter tambahan, seperti penurunan suku bunga lebih lanjut atau pelonggaran kuantitatif, tidak lagi efektif dalam mendorong permintaan agregat. Dalam situasi seperti ini, meskipun bank sentral menambah jumlah uang yang beredar atau menurunkan suku bunga, masyarakat dan perusahaan mungkin tetap enggan untuk berinvestasi atau membelanjakan uang mereka karena ketidakpastian ekonomi, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif yang diharapkan dari kebijakan moneter tersebut.

Selain itu, kebijakan fiskal yang tidak direncanakan dengan baik atau tidak terkelola dengan hati-hati dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan fiskal negara, seperti pembengkakan defisit anggaran dan peningkatan utang publik. Meskipun kebijakan fiskal ekspansif dapat merangsang permintaan agregat dalam jangka pendek, jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan baik, kebijakan tersebut bisa berisiko memperburuk ketidakseimbangan fiskal dalam jangka panjang. Kelebihan pengeluaran tanpa peningkatan pendapatan negara yang memadai bisa menyebabkan peningkatan utang yang tidak terkendali, yang dapat menurunkan kepercayaan investor dan mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan disertai dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta penyesuaian kebijakan yang fleksibel dan berbasis pada data ekonomi yang akurat.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk secara terus-menerus memantau dan mengevaluasi dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan. Proses evaluasi yang efektif akan memungkinkan para pengambil keputusan untuk memahami apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul seiring berjalannya waktu. Penyesuaian kebijakan yang cepat dan tepat sangat diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan dengan optimal dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berubah. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat dimanfaatkan secara

maksimal, membantu mencapai tujuan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choudhury, P. (2017). "The Role of Digital Platforms in the Evolution of Business Models." *Journal of Business Research*, 79, 1-19.
- IMF. (2006). "Making Fiscal Space Happen: Managing Fiscal Policy in a World of Scaled-Up Aid." *IMF Working Papers*, 06.270. doi: 10.5089/9781451865301.001
- Chugunov, Igor, Mykola Pasichnyi, Valeriy Koroviy, Tetiana Kaneva, and Andriy Nikitishin. 'Fiscal and Monetary Policy of Economic Development'. *European Journal of Sustainable Development*, 10.1 (2021), pp. 42–52. doi: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p42.
- Das, Ramesh Chandra, Tonmoy Chatterjee, and Enrico Ivaldi. 'Revisiting Policy Combinations under IS–LM–EE Framework Introducing Capacity Utilization'. *Quality and Quantity*, 58.1 (2024), pp. 903–32. doi: 10.1007/s11135-023-01676-x.
- Hery Haryanto, Nurul Jofia, Silvia Salim, and Winda Fionita Sitorus. 'Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran'. *Bata Ilyas Educational Management Review*, 2.2 (2022), pp. 243–51.
- Masbar, Raja, and Sofyan Syahnur. 'Efektifitas Antara Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia: Pendekatan Model IS-LM'. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 12.4 (2014), p. 85.
- Syamsuri, Syamsuri, and Adinda Muftiviany Nur Jamilah. 'The Relations Between Fiscal and Monetary Policy in State Budget Management in Indonesia According to Abu Ubaid Al Qasim Bin Salam'. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 11.2 (2020), pp. 197–214. doi: 10.32678/ijei.v11i2.242.